MANAJEMEN OPTIMALISASI PENGLOLAAN PASAR TRADISIONAL

Rahman Syahputra

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Management Management Optimization of Traditional Markets. This research triggered by problems traditional market management in Indragiri Hilir region less optimal that led to the condition the traditional markets in Indragiri Hilir chaotic and is less get attention from the regional government. In addition, market conditions that affected interest of the community for a visit to traditional markets so in direct have a major influence on the level of the income of traders and also impact the revenue service levies market now it has not been contribute maximally on local revenue Indragiri Hilir. The results show of research and the analysis on lab data it can be seen that the management local government in management optimization traditional markets in Indragiri Hilir not run optimally caused by the planning process that immature and the construction of traditional markets unequal and capacity burden that beyond the ability since the implementation of only handled by one limited field.

Abstrak: Manajemen Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional. Penelitian ini dipicu oleh masalah pengelolaan pasar tradisional di Indragiri Hilir wilayah kurang optimal menyebabkan kondisi bahwa pasar tradisional di Indragiri Hilir kurang kacau dan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Selain itu, kondisi pasar yang mempengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung ke pasar tradisional, sehingga dalam langsung memiliki pengaruh besar pada tingkat pendapatan pedagang dan berdampak juga pasar pendapatan layanan pungutan sekarang belum Berkontribusi maksimal pada pendapatan daerah Indragiri Hilir. Hasil menunjukkan penelitian dan analisis di laboratorium data dapat dilihat bahwa pengelolaan pemerintah daerah dalam optimalisasi pengelolaan pasar tradisional di Indragiri Hilir tidak menjalankan secara optimal yang disebabkan oleh proses perencanaan yang belum matang dan pembangunan pasar tradisional, yang tidak sama dan kapasitas beban yang di luar kemampuan sejak pelaksanaan hanya ditangani oleh satu bidang tertentu.

Kata Kunci: pasar tradisional, manajemen, optimasi

PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Riau yang terus mengolah dan menggali potensi-potensi keuangan daerah agar dapat menerima Pendapatan Asli Daerah, yang salah satunya melalui Retribusi Daerah. Pengertian Retribusi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 angka 64 adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD seiring dengan meningkatnya kebutuhan daerah. Secara umum PAD Kabupaten Indragiri Hilir tidak mengalami peningkatan yang signifikan pada tiap tahunnya dan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal penerimaan PAD belum tercapai secara maksimal. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan banyak pembenahan

dan perbaikan terhadap pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini juga bertujuan untuk mempertahankan keberadaan pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain tujuan utama sebagai tempat proses kegiatan jual beli, diharapkan pula agar keberadaan pasar-pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik dan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir. Namun sejauh ini regulasi tersebut belum memberikan kontribusi yang baik

dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola pasar tradisional sehingga masih kurang efisiennya penerimaan retribusi pelayanan pasar yang bersumber dari obyek retribusi. Selain itu, tidak adanya Badan ataupun Instansi yang secara khusus mengurus retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Indragiri Hilir membuat pelayanan pada wajib retribusi dan pemantapan kegiatan pengelolaan pasar belum terwujud, padahal hal ini sangat penting demi terwujudnya peningkatan pelayanan pasar dan pengelolaan pasar yang maksimal. Dengan demikian diharapkan agar pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir dapat terpelihara ketertiban dan kebersihannya serta kegiatan pasar lebih kondusif.

Sampai dengan tahun 2015 ini, dari 13 (tiga belas) pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, baru 6 (enam) pasar saja yang telah terealisasi pembangunan dan perbaikannya yaitu Pasar Kayu Jati (Pasar Umbut Kelapa) Tembilahan, Pasar Mayang Kelapa Tembilahan, Pasar Pagi PJ Tembilahan, Pasar Kelapa Gading Tembilahan, Pasar Kuala Enok dan Pasar Bertingkat Guntung. Untuk Pasar Pagi PJ dan Pasar Mayang Kelapa Tembilahan sendiri hingga saat ini masih belum ditempati secara keseluruhan oleh pedagang sehingga hanya beberapa kios saja yang baru ditempati. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana pendukung bagi pedagang untuk berjualan. Sementara itu untuk pembangunan Pasar Bertingkat Guntung yang dibangun sejak tahun 2011 lalu hingga saat ini pembangunannya belum rampung 100%. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen dan evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan pasar tradisional agar pemungutan retribusi pelayanan pasar dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

GR. Terry menyebutkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan, baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum-

nya. Untuk lebih jelasnya fungsi manajemen yang dikemukakan mengenai “Prinsip-Prinsip Manajemen” yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen yang disingkat POAC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Atas konsep demikian, maka manajemen pemerintahan daerah dapat dimaknai proses pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan dan penggunaan sumber-sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada tataran pemerintahan daerah (*local government*).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian wawancara (*interview research*). Dari penelitian ini penulis memperoleh data mengenai sejarah objek penelitian, struktu organisasi, kegiatan objek penelitian dan data lain yang berhubungan dengan penulisan ini. Dalam melakukan penelitian penulis berusaha melakukan analisis atas semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, dengan menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif, teknis yang digunakan adalah dengan uraian-uraian (*deskripsi*) terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar tradisional menjadi sarana pertemuan antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian, untuk menunjang pelayanan pasar yang baik maka dibutuhkan kondisi pasar yang nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Kondisi sebagian pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir yang masih mengkhawatirkan dan jauh dari kata nyaman seakan terkesan bahwa tidak mendapat perhatian dari Pemerintah. Kondisi tersebut tentu saja me-

nimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat sebagai pedagang pasar maupun pembeli.

Selain itu, keberadaan pasar tradisional yang berada di tengah kota telah menyebabkan ketimpangan pertumbuhan pembangunan ekonomi, yaitu masih terpusatnya kegiatan perekonomian di pusat kota. Kondisi ini selain menimbulkan ketidakmerataan hasil pembangunan, juga mengakibatkan menumpuknya arus orang dan barang ke pusat kota yang pada akhirnya menimbulkan dampak seperti kemacetan lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Hal ini kemudian menjadi salah satu dasar dari perumusan kebijakan perdagangan. Atas dasar itu, dalam RTRW Kabupaten Indragiri Hilir telah direncanakan untuk merelokasi pasar dari pusat kota ke daerah pinggiran dan membangun pasar-pasar di setiap kecamatan dalam rangka untuk mengoptimalkan pengembangan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir.

Perencanaan dan Pengorganisasian dalam Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan hal tersebut dapat dicapai. Perencanaan meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Adapun perencanaan yang akan dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir seperti dalam pembahasan sebagai berikut:

Penentuan Target

Target pembangunan merupakan tolak ukur realisasi pengelolaan pasar tradisional oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target pembangunan yang

ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun target pembangunan pasar tradisional dengan cara turun langsung ke pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan uji petik potensi-potensi yang ada di pasar tradisional setiap tahunnya, dengan maksud untuk melakukan pendataan ulang setiap potensi yang ada di setiap pasar tradisional seperti jumlah pedagang yang masih aktif berdagang maupun jumlah penggunaan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah karena setiap tahunnya jumlah pedagang yang masih aktif menggunakan tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah selalu mengalami perubahan. Dengan dilakukannya pendataan tersebut maka diharapkan terjadi peningkatan pedagang seiring peningkatan kualitas pasar tradisional setiap tahunnya.

Secara teknis, perencanaan pengembangan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang mana telah dijelaskan bahwa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang mana dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Namun dalam kenyataannya, masalah penyediaan fasilitas pasar bagi pedagang hingga saat ini masih menjadi satu persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada pendataan pedagang dan jumlah penggunaan tempat berjualan yang tidak menentu jumlahnya setiap tahun dan melihat semua potensi-potensi yang ada pada pasar tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir termasuk dalam hal penerimaan retribusi pelayanan pasar kabupaten Indragiri Hilir.

Struktur Organisasi

Pengorganisasian yang dimaksud disini adalah bagaimana sumber daya manusia dalam memegang peranan penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini,

kualitas aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya seharusnya harus mampu menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

Pada semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak kurang ataupun tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan kekurangan sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Daerah juga diharuskan agar menjalankan prinsip manajemen yang baik dengan melakukan pengorganisasian yang tepat dalam suatu kebijakan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik serta dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pasar di Kabupaten Indragiri Hilir, dalam pelaksanaannya telah membentuk strukturisasi pegawai yang sesuai dengan tugas serta fungsinya masing-masing. Dalam hal mengurus pasar maka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir secara khusus ditangani oleh Bidang Pasar.

Pelaksanaan Pengelolaan

Dalam pelaksanaan pembangunan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dengan tujuan untuk menciptakan kelancaran pembangunan dan tercapainya target yang diinginkan. Dalam pembangunan Pasar Umbut Kelapa di Kecamatan Tembilihan Hulu pada tahun 2014 lalu yang menggunakan dana sebesar 5,6 Miliar tersebut merupakan pembangunan yang mana selain pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir juga bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Riau sebesar 1,2 Miliar yang berasal dari APBD Riau dan DAK APBN 2014.

Selain dari pada itu, dalam pembangunan

dan pembenahan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga mendapatkan bantuan dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk dana CSR (*Corporate Social Responsibility*). Terhitung ada sebanyak lima perusahaan perkebunan dan kehutanan yang mendonasikan bantuan dalam upaya menyelesaikan beberapa permasalahan dalam pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir melalui program CSR tersebut.

Menjaga Ketentraman dan Ketertiban

Sebagai bentuk konkrit dari upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjaga ketentraman dan ketertiban pasar, melalui seksi ketertiban dan penyuluhan Bidang Pasar telah menyiapkan 6 petugas trantib yang kemudian ditempatkan di setiap Pasar Tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan

Demi terwujudnya tujuan dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir, maka tentu harus adanya pengawasan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini jelas perlu dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Salah satu bentuk pengawasan dalam pengelolaan Pasar Tradisional yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan melakukan pengawasan langsung atau dengan inspeksi mendadak terhadap pasar tradisional yang ada. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat langsung melihat kondisi pasar dan pedagang baik dari segi ketertiban maupun keadaan harga barang.

Kendala dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Anggaran Pembangunan

Masih minimnya dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan pembangunan beberapa Pasar Tradisional yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi salah satu faktor penghambat dalam

pengelolaan Pasar Tradisional yang optimal. Hal ini dapat dilihat pada pembangunan Pasar Tradisional Guntung yang berada di Kecamatan Kateman yang mana pembangunannya telah dilakukan sejak tahun 2011 lalu namun hingga saat ini masih belum terselesaikan. Hal lain terjadi pada pembangunan Pasar Tradisional Mayang Kelapa yang dibangun pada tahun 2013 lalu dimana pelaksanaan pembangunan yang terhambat pada pendanaan sehingga proses pembangunan pasar sempat terhenti. Kendatipun pasar ini telah beroperasi, namun pada kenyataannya masih meninggalkan persoalan dimana belum tersedianya fasilitas yang dibutuhkan oleh pedagang pada sebagian los dan kios. Untuk merealisasikan kebutuhan pedagang tersebut selanjutnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali menyiapkan anggaran pada tahun 2015 ini.

Penerapan Sistem Organisasi

Dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional yang begitu rumit, jelas tidak akan optimal ketika penanganan permasalahan pada Pasar Tradisional hanya ditangani oleh satu instansi yang tidak secara khusus menanani Pasar. Dalam hal ini di Kabupaten Indragiri Hilir permasalahan pengelolaan pasar hanya ditangani oleh satu bidang yang merupakan bagian dari struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dianggap belum mampu menangani permasalahan pengelolaan Pasar Tradisional secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan personil Bidang Pasar yang bertugas dalam penanganan pasar masih sangat minim sehingga masih kerap menyebabkan keterhambatan dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemahaman tentang aktivitas pengelolaan Pasar Tradisional mutlak harus dimiliki oleh aparatur dinas yang benar-benar membidangi dan fokus dalam pengelolaan pasar hingga dalam pelaksanaannya para aparatur pelaksana lebih memahami hal-hal yang mendasar tentang pengelolaan Pasar Tradisional. Untuk itu, sudah sewajarnya jika pelaksanaan pengelolaan pasar di Kabupaten Indragiri Hilir ditangani oleh satu instansi khusus yaitu Dinas Pasar.

Pasar sebagai Penghasil PAD

Kepedulian Pemerintah Daerah terhadap Pasar Tradisional menentukan arah kebijakan dan bentuk organisasi dari instansi yang membidangi Pasar Tradisional di daerah. Di Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah meletakkan posisi Pasar Tradisional semata-mata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang dipungut dari para pedagang daripada penekanan pada pengelolaan pasar termasuk di dalamnya pembinaan pedagang. Hal ini menyebabkan sebagian besar Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir dalam kondisi yang semrawut karena kurang baiknya manajemen dalam pengelolaan pasar.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan Pasar Tradisional dapat dikatakan lebih kepada perbaikan fisik bangunan pasar saja tanpa disertai dengan pembangunan kelembagaan seperti pengembangan organisasi pengelola pasar tradisional, termasuk di dalamnya pengembangan sistem manajemen pasar beserta Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan pasar.

Setelah dilakukannya renovasi atau pembangunan kembali bangunan pasar selama kurun waktu 2-3 tahun kemudian bangunan pasar beserta pengelolaan pasarnya tampak kembali mengalami kesemrawutan dengan kondisi pasar yang kembali kumuh dan kotor sama keadaannya sebelum dilakukan renovasi. Hal ini tambah diperparah dengan tidak adanya kegiatan perawatan dan pemeliharaan pasar yang dilakukan Pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran daerah. Hal ini terjadi karena kebijakan pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir hanya sebatas menyentuh pada pembangunan fisik pasar yang tidak diikuti dengan aktivitas perawatan dan pemeliharaan pasar.

SIMPULAN

Perencanaan yang belum matang menyebabkan proses pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir tidak berjalan optimal. Selain itu, sistem pengorganisasian yang kurang optimal karena kapasitas beban melebihi kemampuan dari Pemerintah Daerah sebagai pihak pelaksana. Hal ini dapat dilihat dari

pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional yang ditangani oleh tingkatan Bidang saja dalam hal ini ditangani oleh Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejauh ini belum cukup mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi pada Pasar Tradisional. Minimnya aparatur pengelola serta kurangnya pemahaman dalam bidang manajemen pasar menyebabkan tidak terlaksananya pengelolaan Pasar Tradisional yang baik.

Kurangnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional mengakibatkan proses pembangunan yang terkesan lambat sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dirasakan secara maksimal. Tidak adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Pasar Tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan tidak terlaksananya manajemen yang baik dalam pengelolaan pasar tradisional sehingga kurang optimalnya pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahmat, Fathoni, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amirul Hadi, Haryono, 1998. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Astrid, Soesanto, 1983. *Dasar-Dasar Sosiologi dan Pengantar Sosial*. Jakarta: Bina Cipta
- Ateng, Syafrudin, 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: BMA Cipta
- Ishak., 2010. *Posisi Politik Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku
- Malayu S.P. Hasibuan., 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- M. Manullang, 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press
- Marihot P, Siahaan, 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Idrus, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Prasetya, Irawan, 2004. *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA LAN Press
- Ruhul Fitrioso, Rusli, 2007. *Pengantar Hukum Pajak*. Pekanbaru: Unri Press
- Siswanto Sunarno, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Soerjono, Soekanto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press
- Taliziduhu, Ndraha, 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.